

## Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Jawa Timur

<sup>1</sup> Tri Haryanto, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>2</sup> Angga Erlando, Universitas Airlangga, Indonesia

<sup>3</sup> Verliana Rositawati, Universitas Airlangga, Indonesia

### Informasi Naskah

Submitted: 20 Mei 2020

Revision: 14 Juli 2020

Accepted: 22 Juli 2020

### Kata Kunci:

Kemiskinan, logit, probability, determinan

### Abstract

*This study aims to determine the economic, demographic, and social characteristics that are determinants of poverty, and analyze how the level of tendency (probability) in shaping poverty in East Java. Using a quantitative approach, this research relies on a logistical model (logit). The logit model aims to find the probability of an event occurring, in this case the probability of a household heading into poverty or not. The result is that education of household heads, gender of household heads, household size, household head work sector, access to KUR, and access to poor health insurance have a tendency to be determinants for household heading to poverty status. Educational variables, gender of the head of household, and access to KUR from this paper empirically show a tendency to reduce the probability of households to poor. Meanwhile increasing household size, types of employment in the agricultural sector, and the ownership of poor health insurance tend to increase the probability of households heading into poverty status.*

### Abstrak

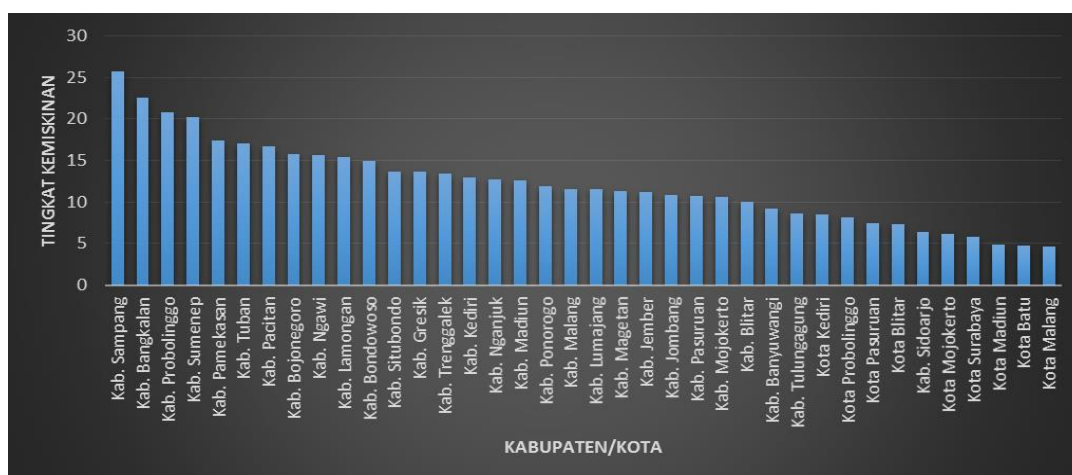
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik ekonomi, demografi, dan sosial yang menjadi determinan kemiskinan, serta melihat bagaimana tingkat kecenderungan/probabilitasnya dalam membentuk kemiskinan di Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengandalkan model logistik (logistic model). Model logit bertujuan untuk mencari kemungkinan (probability) terjadinya suatu kejadian, dalam hal ini probabilitas rumah tangga menuju ke dalam status kemiskinan atau tidak. Hasilnya bahwa pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, sektor pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap KUR, dan akses terhadap asuransi kesehatan miskin bertendensi/berkecenderungan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga. Variabel pendidikan, jenis kelamin kepala rumah tangga seorang wanita, dan akses terhadap KUR dari kajian yang dilakukan secara empiris menunjukkan memiliki kecenderungan untuk menurunkan probabilitas rumah tangga untuk menuju ke dalam kemiskinan. Sementara itu variabel ukuran rumah tangga yang semakin besar, jenis pekerjaan di sektor pertanian, dan kepemilikan asuransi kesehatan miskin kecenderungan untuk meningkatkan kemungkinan rumah tangga menuju ke dalam status kemiskinan.

\* Corresponding Author.

Angga Erlando, e-mail: [angga.erlando@feb.unair.ac.id](mailto:angga.erlando@feb.unair.ac.id)

## PENDAHULUAN

Jawa Timur menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi ini menduduki peringkat ke 15 sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Provinsi ini mencapai 12,28% pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 12,34 pada tahun berikutnya. Jika dilihat di tingkat daerah kabupaten/kota, kemiskinan di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan pola yang sangat timpang. Beberapa wilayah seperti Kota Malang, Kota Batu, dan Kota Madiun memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, sementara wilayah-wilayah di daerah tapal kuda seperti Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat kemiskinan yang relatif cukup tinggi. Kota Malang sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah memiliki persentase penduduk miskin sebesar 4,5 % pada tahun 2015. Sementara Kabupaten Sampang memiliki angka tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 25,80 % di tahun yang sama.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

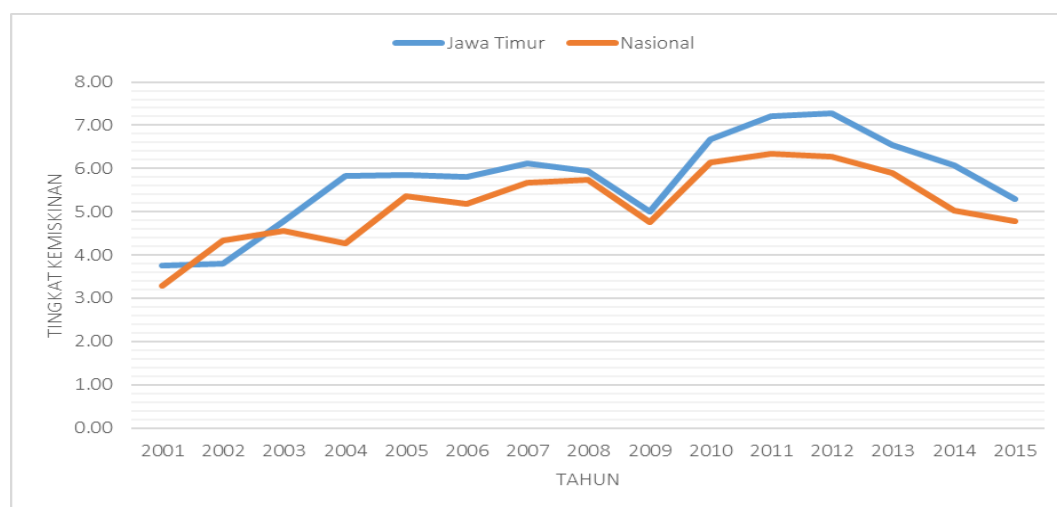
**Gambar 1. Kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015**

Kondisi yang demikian cukup kontradiktif, mengingat Jawa Timur adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, dan konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Era reformasi tahun 2001 pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur adalah 3,75% berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,29%. Walaupun sempat tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 3,80% di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,34%. Namun di periode selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menandakan Jawa Timur menjadi kontributor pertumbuhan nasional yang signifikan secara konsisten.

Menelaah teori "*trickledown effect*" oleh Kuznets, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya memberikan efek pada penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah (Vaughan, 1997; Aghion dan Bolton, 1997; Gobel dan Saleh, 2020; Zhan *et al.*, 2020). Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuka kesempatan kerja secara lebih luas (*employment creation*), meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada tahap selanjutnya mengurangi tingkat kemiskinan (Gobel dan Saleh, 2020; Zhan *et al.*, 2020). Berbagai studi terdahulu juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kunci penurunan tingkat kemiskinan (Miranti, 2010; Michálek dan Výmbořtok, 2019; Bhuyan *et al.*, 2020; Lee dan Kim, 2020; ).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang umumnya terbukti menjadi faktor penentu kemiskinan rumah tangga. Salah satu faktor tersebut adalah pendidikan kepala rumah tangga yang rendah (Jallan dan Ravalion, 1998; Ai dan Kameyama, 2019; Lijie *et al.*, 2019; Paul, 2019). Hal ini terjadi karena kepala rumah tangga sebagai orang yang bertanggung jawab menghidupi keluarga tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pelayanan publik yang layak (van Zon *et al.*, 2019). Pendidikan

yang terbatas membuat kepala rumah tangga tidak mampu mengakses berbagai macam sumber daya dan informasi sehingga mereka tidak dapat keluar dari kemiskinannya (Todaro dan Smith, 2006). Selain itu, teori human capital oleh Reid (2019) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas seseorang sehingga ia dapat meningkatkan kesejahteraannya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

**Gambar 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2001-2015**

Faktor demografis yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan adalah ukuran rumah tangga atau jumlah anggota rumah tangga (Edig & Schwarze, 2011; Dacuycuy & Lim, 2013). Semakin besar ukuran sebuah rumah tangga, maka semakin besar pula biaya hidup yang harus ditanggung oleh sebuah keluarga (Wardhana, 2010). Hal ini terjadi karena pendapatan yang diterima oleh sebuah keluarga harus dibagi dengan anggota rumah tangga yang lebih banyak sehingga pendapatan ataupun pengeluaran per kapitanya menjadi relatif lebih kecil (Duarte, 2014). Faktor penting lain yang dikaitkan dengan kemiskinan adalah jenis kelamin kepala rumah tangga (Bent, 2019; Patel, 2019; Pueyo dan Maestre, 2019). Kepala rumah tangga dengan jenis kelamin wanita diyakini menjadikan sebuah rumah tangga jatuh miskin (Herrera, 1999). Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya khususnya di Negara Sedang Berkembang (NSB). Peran wanita di Negara Sedang Berkembang (NSB) umumnya masih terbatas dalam urusan publik ataupun pasar tenaga kerja (Todaro dan Smith, 2006). Masih banyak stigma yang menyatakan bahwa wanita tidak lebih terampil dibandingkan dengan pria (Dartanto dan Nurkholis, 2013;). Selain itu, banyak program anti kemiskinan baik ditingkat nasional ataupun di daerah seperti yang menempatkan kaum perempuan sebagai target program pengentasan kemiskinan, misalnya pemberdayaan koperasi wanita dan UMKM.

Sementara itu, sektor pekerjaan seperti halnya jenis pekerjaan kepala rumah tangga juga diduga menjadi faktor penentu kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Swastika & Supriyatna (2008) dan Dartanto & Nurkholis (2013) menyatakan bahwa kepala rumah tangga yang mengalami kemiskinan umumnya dikarenakan mereka bekerja di sektor pertanian (primer). Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang kemiskinan yang tinggi di negara berkembang karena keterbatasan pada akses modal, sempitnya lahan yang dikelola atau bahkan hanya bekerja sebagai buruh tani atau tanpa kepemilikan lahan (Todaro dan Smith, 2006; Edig dan Schwarze, 2011).

Kemiskinan rumah tangga juga dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil pemerintah (Kimsun, 2012). Salah satu kebijakan tersebut adalah pemberian asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin maupun rentan miskin. Pemberian asuransi kesehatan kepada kelompok miskin dan rentan miskin diyakini dapat membantu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan akibat adanya *shock* atau guncangan seperti sakitnya kepala rumah tangga (Miranti, 2010). Pemberian asuransi kesehatan kepada masyarakat miskin dan rentan dapat membantu

mengurangi biaya perawatan kesehatan sehingga proses pengobatan lebih mudah dilakukan dan mereka bisa kembali produktif bekerja (Johnston *et al.*, 2019). Meskipun demikian, studi empiris yang dilakukan oleh Dartanto dan Nurkholis (2013) menemukan bahwa pemberian asuransi kesehatan kepada kelompok miskin dan rentan tidak serta merta dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan. Temuannya bahwa asuransi kesehatan miskin dapat membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan di wilayah atau region tertentu saja seperti Jawa dan Sumatra. Sementara di wilayah lain, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara pemberian asuransi kesehatan miskin terhadap kemiskinan rumah tangga.

Kebijakan lain yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan sebuah rumah tangga adalah pemberian akses kredit (Jalan dan Ravallion, 1998; Dartanto & Nurkholis, 2013). Pemberian kredit secara konseptual diyakini mampu memberikan kesempatan kepada rumah tangga untuk melakukan aktifitas ekonomi dengan lebih baik (Runsinarith, 2011). Hal ini terjadi karena rumah tangga mendapatkan kesempatan untuk mengakses sumber daya (*resource*) dalam hal ini dukungan secara finansial untuk melakukan pengembangan usahanya. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Morduch dan Haley (2002) menyebutkan bahwa pemberian akses kredit kepada rumah tangga miskin di Canada membantu rumah tangga tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, ia menyarankan pemberian akses kredit kepada rumah tangga miskin sebagai salah satu strategi dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Oludiran (2004) pada rumah tangga nelayan di Nigeria menemukan bahwa pemberian akses kredit tidak terbukti membantu rumah tangga keluar dari kemiskinan.

Penelitian terkait determinan kemiskinan tingkat rumah tangga sesungguhnya telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian determinan kemiskinan telah dilakukan oleh Teka *et al.*, (2005) di Kenya; Runsinarith (2011) di Kamboja; Majeed dan Muhammad (2014) di Pakistan; Duarte (2014) di Paraguay; dan Biyase & Talent (2017) di Afrika Selatan. Sementara itu, studi empiris faktor penting penentu kemiskinan di Indonesia tingkat rumah tangga dilakukan oleh Jacobus (2014) di Kabupaten Kendari. Temuan faktor penentu kemiskinan juga sangat bervariasi diantara para peneliti sebelumnya. Secara umum, penelitian determinan kemiskinan hanya memasukkan variabel sosial seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga; dan variabel ekonomi seperti sektor pekerjaan kepala rumah tangga saja. Analisis pengaruh variabel-variabel guncangan (*shock*) ataupun kebijakan terhadap kemiskinan masih harus dikembangkan. Selain itu, hubungan variabel guncangan (*shock*) ataupun kebijakan terhadap kemiskinan juga masih kontradiktif dan inkonsisten antara satu kajian dengan kajian yang lain. Oleh karena itu, dengan mengacu penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Runsinarith (2011) dan Duarte (2014), studi ini akan berfokus pada pengaruh variabel-variabel kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap kemiskinan rumah tangga dalam konteks Provinsi Jawa Timur. Analisis lanjutan ini diharapkan menemukan bentuk karakteristik dan fakta empiris kemiskinan ditingkat rumah tangga di Jawa Timur sebagai bentuk tujuan penelitian ini. Temuan empiris ini pada tahap selanjutnya diharapkan dapat berguna untuk melengkapi kesenjangan studi sebelumnya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Studi ini dapat digolongkan sebagai penelitian kuantitatif. Terdapat dua tahap pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini. Tahap pertama adalah analisis deskriptif dengan menelaah karakteristik rumah tangga menjadi yang miskin dan tidak miskin berdasarkan karakteristik ekonomi, demografi, dan sosialnya. Tahap kedua adalah analisis inferensial dengan pendekatan ekonometrika berupa regresi Logit (*Logistic Regression*) untuk mengetahui determinan kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan model *logistic* dilakukan karena variabel dependen dalam model bersifat biner atau dikotomi.

Variabel dikotomi terdiri atas dua nilai, yang mewakili kemunculan atau tidak adanya suatu kejadian yang biasanya diberi angka 0 atau 1. Tujuan pada model yang variabel dependennya bersifat kualitatif adalah untuk menemukan probabilitas dari sebuah kejadian, seperti kemungkinan rumah tangga untuk jatuh miskin atau tidak (Gujarati dan Poter, 2012). Selain itu, tujuan lain penggunaan regresi logistik adalah untuk menanggulangi kelemahan dari LPM (*Linier Probability Model*) yang memberikan hasil yang kurang memuaskan karena menghasilkan

probabilitas taksiran (*estimated probability*) yang kurang dari nol atau lebih dari satu (Suwardi, 2011).

Model determinan kemiskinan rumah tangga di Jawa Timur, menggunakan variabel dependen dummy yaitu apakah rumah tangga miskin atau tidak miskin. Sementara variabel independen yang digunakan adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, dummy jenis kelamin kepala rumah tangga, dummy sektor pekerjaan kepala rumah tangga, dummy kepemilikan asuransi kesehatan miskin, dan dummy menerima akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini variabel independen mewakili tiga karakteristik yang mewakili unsur ekonomi, demografi, dan sosial.

Dummy kemiskinan rumah tangga (*Dpoverty*) menunjukkan apakah sebuah rumah tangga miskin atau tidak. Nilai dari variabel dependen ini diperoleh dari perbandingan pendapatan atau pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap garis kemiskinan (makanan dan non makanan) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 untuk wilayah baik perdesaan maupun perkotaan. Hasil perbandingan ini akan mendikotomikan rumah tangga menjadi dua golongan yaitu rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan atau pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan atau kurang dari garis kemiskinan akan dikategorikan miskin dan diberi nilai 1. Sementara itu rumah tangga yang memiliki pendapatan atau pengeluaran perkapita di atas garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai rumah tangga tidak miskin dan diberi nilai 0.

Selanjutnya variabel independen diantaranya: tingkat pendidikan kepala rumah tangga (*Edu*) adalah tingkat pendidikan formal yang diperoleh oleh kepala rumah tangga. Proxy yang digunakan dalam variabel ini adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh kepala rumah tangga dalam menamatkan pendidikan formalnya. Pada data Susenas, variabel ini ditunjukkan oleh indikator tingkat pendidikan formal terakhir yang berhasil ditamatkan kemudian dikonversi kedalam satuan tahun. Ukuran rumah tangga (*hhsz*) adalah perhitungan jumlah anggota keluarga yang masih hidup dan tinggal dalam satu rumah. Misalkan dalam sebuah rumah tangga terdapat kedua orang tua dan dua anak maka ukuran rumah tangga adalah empat. Satuan dari variabel ini adalah satuan orang. *Dummy* jenis kelamin kepala rumah tangga (*Dsex*) adalah menunjukkan jenis kelamin kepala rumah tangga, apakah laki-laki atau wanita. Variabel *dummy* ini akan bernilai 0 jika kepala rumah tangga berjenis kelamin laki-laki dan bernilai 1 jika kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan. *Dummy* sektor pekerjaan kepala rumah tangga (*Dsector*) adalah menunjukkan pada sektor apakah kepala rumah tangga bekerja. Variabel *dummy* ini bernilai 0 jika kepala rumah tangga bekerja di sektor non pertanian dan bernilai 1 jika kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian. *Dummy* kepemilikan asuransi kesehatan masyarakat miskin (*Dinsurance*) adalah variabel yang menunjukkan apakah sebuah rumah tangga memiliki kartu asuransi kesehatan miskin atau tidak. Variabel *dummy* ini bernilai 0 jika rumah tangga tidak memiliki kartu asuransi kesehatan miskin dan bernilai 1 jika rumah tangga memiliki kartu asuransi kesehatan miskin. *Dummy* menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) (*Dcredit*) adalah variabel yang menunjukkan apakah sebuah rumah tangga menerima KUR atau tidak. Variabel *dummy* ini bernilai 0 jika rumah tangga tidak menerima KUR dan bernilai 1 jika rumah tangga menerima KUR.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder berupa data *cross section* tingkat rumah tangga tahun 2015. Data tersebut merupakan sampel yang diambil dari survei tingkat individu dan rumah tangga berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sampel yang digunakan adalah sampel tingkat rumah tangga yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pada tahap selanjutnya, data difilter berdasarkan kelengkapannya. Artinya, hanya observasi dengan data yang lengkap yang akan diolah lebih lanjut. Filterisasi ini didasarkan pada kelengkapan data, artinya hanya rumah tangga yang memiliki data variabel pengeluaran per kapita, ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, sektor pekerjaan kepala rumah tangga, kepemilikan asuransi kesehatan miskin, dan penerima KUR yang lengkap yang akan digunakan pada tahap selanjutnya.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif atau *binary*, maka salah satu model ekonometrika yang dianggap paling tepat digunakan adalah model logistik (*logistic model*). Model logit bertujuan untuk mencari kemungkinan (*probability*) terjadinya suatu peristiwa (Gujarati, 2003). Penelitian ini menggunakan model logit untuk mencari

kemungkinan (*probability*) rumah tangga jatuh kedalam kemiskinan atau tidak. Secara matematis, identifikasi rumah tangga menjadi miskin dapat dinyatakan dengan:

$$P_i = E \left( Y_i = \frac{1}{X_i} \right) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}} \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan di atas juga dapat ditulis menjadi sebagai berikut:

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{e^{Z_i}}{1 + e^{Z_i}} \dots \dots \dots (2)$$

Jika  $P_i$  adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa terbebas atau jatuh miskin, maka kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa ( $1 - P_i$ ) adalah:

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{Z_i}} \dots \dots \dots (3)$$

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{1 + e^{-Z_i}}{1 + e^{Z_i}} = e^{Z_i} \dots \dots \dots (4)$$

$\frac{P_i}{1 - P_i}$  disebut sebagai *odds* suatu peristiwa, yaitu rasio kemungkinan terjadinya suatu peristiwa terhadap kemungkinan tidak terjadinya suatu peristiwa. Jika persamaan (4) ditransformasikan menggunakan konsep logaritma natural, maka diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$L_i = \ln \left[ \frac{P_i}{1 - P_i} \right] = Z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \dots \dots \dots (5)$$

$L_i$  adalah log dari *odds* yang bersifat linier dalam  $X_i$  dan linier dalam parameter.  $L_i$  disebut logit, sehingga persamaan (5) disebut dengan model logit.

Metode estimasi yang digunakan dalam model logit adalah metode *maximum likelihood*, sebuah metode estimasi yang digunakan untuk sampel dalam jumlah besar sehingga estimasi dari *standar error* menjadi *asymptotic*. Oleh karena itu, proses evaluasi dari signifikansi suatu koefisien secara statistik tidak lagi menggunakan *t-statistic*, akan tetapi sebagai gantinya menggunakan *Z-statistic* sehingga pengujiannya berdasarkan pada tabel distribusi normal. Perlu diingat kembali bahwa ketika suatu sampel yang digunakan cukup besar, distribusi *t* (*t distribution*) menjadi konvergen terhadap distribusi normal.

Suatu variabel dikatakan terdistribusi normal ketika nilai rata-ratanya adalah nol dan nilai variansnya adalah satu. Secara matematis, variabel yang terdistribusi normal dapat dinotasikan sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \dots \dots \dots (6)$$

Tanda  $\sim$  berarti terdistribusi, notasi  $N$  menunjukkan distribusi normal, dan dua simbol dalam kurung adalah parameter dari distribusi normal, yaitu rata-rata dan varian. Oleh karena itu, ketika rata-rata variabel  $X$  terdistribusi normal dengan nilai rata-rata nol dan varians satu, maka notasi tersebut menjadi:

$$X \sim N(0, 1) \dots \dots \dots (7)$$

Sementara itu, nilai  $Z_a$  dapat dihitung dari formula:

$$Z = \frac{(Z - \mu)}{\sigma} \dots \dots \dots (8)$$

Nilai *Z-statistic* tersebut digunakan untuk menguji koefisien dari variabel independen secara parsial.

Pengujian signifikansi koefisien secara simultan dalam kajian ini menggunakan *Likelihood Ratio (LR) Statistic* yang konsepnya mirip dengan uji *F (F-test)* pada model regresi linier. Fungsi dari keduanya adalah sama yaitu untuk menguji hipotesis *null* bahwa semua koefisien kemiringan secara simultan sama dengan nol. *LR statistic* mengikuti distribusi  $\chi^2$  dengan *degree of freedom* sama dengan jumlah variabel penjelas (tidak termasuk *intercept*). Hipotesis dari uji *Likelihood Ratio (LR)* adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0 \dots \dots \dots (9)$$

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengukuran *goodness of fit* adalah untuk melihat ketepatan model dalam memprediksi variabel dependennya. Menurut Suwardi (2011), pengukuran *goodness of fit* dalam model dengan variabel dependen berbentuk biner dengan ukuran konvensional tidak dapat digunakan atau memungkinkan, sebagai pengganti dapat digunakan *pseudo R<sup>2</sup>*. Program STATA 13 sebagai program yang digunakan dalam penelitian ini

secara otomatis menyediakan McFadden  $R^2$  untuk mengukur *goodness of fit*. Sama seperti McFadden juga bernilai antara 0 dan 1. Namun perlu diingat bahwa dalam model regresi yang variabelnya biner, *goodness of fit* adalah kriteria terpenting nomor dua setelah nilai koefisien variabel independen bersifat positif atau negatif, dan signifikansi nilainya secara statistik (Gujarati dan Poter, 2012).

Baum (2006) mengungkapkan bahwa model regresi logit memungkinkan untuk melakukan interpretasi hasil dengan menggunakan koefisien logit. Jika koefisien memiliki tanda positif maka ketika nilai dari variabel tersebut meningkat, nilai log dari *odds* atau kecenderungan terjadinya perubahan status kemiskinan ( $Y=1$ ) meningkat. Sebaliknya ketika tanda dari nilai logit tersebut adalah negatif, maka nilai log dari *odds* atau kecenderungan terjadinya rumah tangga menjadi miskin ( $Y=1$ ) menurun seiring dengan peningkatan nilai  $X$  (Baum, 2006).

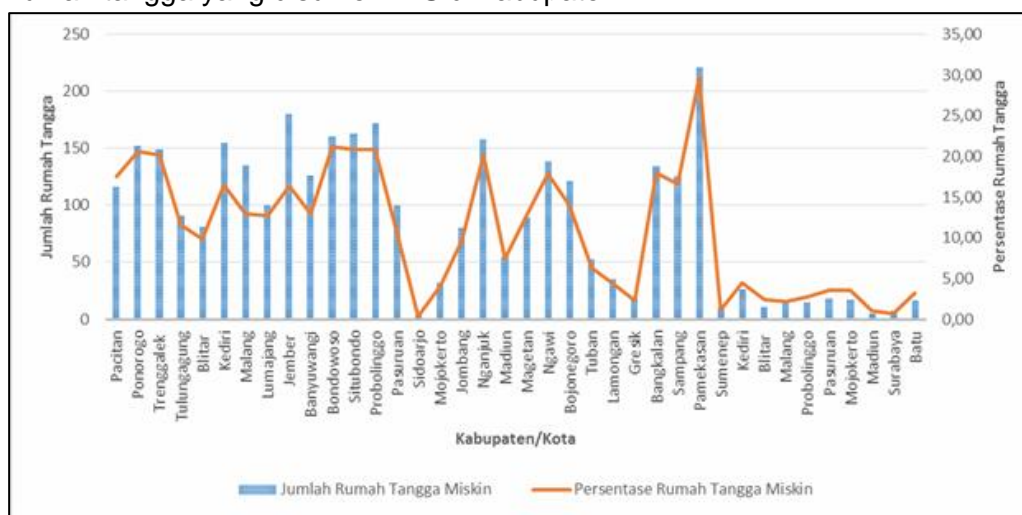
Hal tersebut berlaku ketika variabel independen berkala kontinyu atau diskrit, ketika variabel bebas bersifat kategorikal, nilai log dari *odds* rumah tangga menjadi miskin ( $Y=1$ ) akan lebih besar ketika  $Z=1$ , dibandingkan ketika  $X=0$  atau dibandingkan ketika yang terjadi adalah kategori  $X$  yang menjadi basis.

Selain tanda dari koefisien logit, nilai *odds* juga dapat dilakukan dalam analisis (Gujarati, 2003). Nilai *odds ratio* diperoleh dengan mentransformasikan nilai logit menjadi anti-log sebagaimana yang telah dijelaskan. Ketika variabel bebas berskala kategorikal, kecenderungan terjadinya perubahan status kemiskinan ( $Y=1$ ) pada  $X=1$  sebesar  $e^\beta$  kali dibandingkan  $X=0$  atau dibandingkan dengan kategori  $X$  yang menjadi basis. Pada sisi lain, untuk variabel bebas berskala kontinyu atau diskrit, apabila nilai *odds ratio* lebih atau sama dengan satu, maka semakin besar kemungkinan terjadinya rumah tangga menjadi miskin. Setiap kenaikan variabel bebas akan memperbesar kemungkinan rumah tangga menjadi miskin sebesar  $e^\beta$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kemiskinan Jawa Timur di Tingkat Daerah

Berdasarkan data Susenas tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2015, daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pamekasan. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Pamekasan adalah sebesar sebesar 29,62 persen dari seluruh sampel rumah tangga yang disurvei BPS di kabupaten ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

### Gambar 3. Kemiskinan di Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya diikuti oleh Kabupaten Bondowoso dengan rumah tangga miskin rumah sebesar 21,22 persen, Kabupaten Situbondo sebesar 20,90 persen, dan Kabupaten Probolinggo sebesar 25,82 persen. Sementara itu, kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan sebesar 0,66 persen dari total sampel rumah tangga pada tahun 2015. Wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah berikutnya adalah Kota Madiun sebesar 1 persen, dan Kabupaten Sumenep sebesar 1,21 persen

## Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Jawa Timur

### Karakteristik Ekonomi

Karakteristik ekonomi rumah tangga miskin yang menjadi fokus dalam studi ini adalah sektor pekerjaan kepala rumah tangga dan penerimaan akses KUR. Berdasarkan sektor kerja kepala rumah tangga, jumlah kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian adalah sekitar 32,63 persen. Sementara itu, 67,37 persen kepala rumah tangga bekerja di sektor non pertanian. Jumlah rumah tangga miskin juga lebih banyak ditemukan pada rumah tangga dengan pekerjaan utama pada sektor pertanian yakni sebesar 18 persen dibandingkan non pertanian sebesar 8 persen. Distribusi rumah tangga miskin berdasarkan sektor pekerjaan kepala rumah tangga tercantum dalam Tabel berikut.

**Tabel 1.**

**Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Sektor Pekerjaan Kepala Rumah Tangga**

Karakteristik Ekonomi		Status Kemiskinan	Jumlah		Proporsi
			Frekuensi*	%	
Sektor Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	Pertanian	Miskin	1.743	5,97	<b>0,18</b>
		TidakMiskin	7.788	26,66	<b>0,82</b>
		Total	9.531	32,63	
	Non Pertanian	Miskin	1.535	5,26	<b>0,08</b>
		TidakMiskin	18.143	62,11	<b>0,92</b>
		<b>Total</b>	<b>19.678</b>	<b>67,37</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan: \* mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga.

Selanjutnya dari perspektif ekonomi yang lain rumah tangga miskin di Jawa timur juga dapat ditinjau dari aksesnya terhadap KUR. Pada tahun 2015, hanya terdapat sekitar 3,09 persen rumah tangga yang menerima akses kredit. Sementara itu, kondisi yang timpang muncul dari jumlah rumah tangga miskin yang tidak menerima akses kredit yaitu sekitar 11,09 persen. Hal ini berbeda dengan jumlah rumah tangga tidak miskin yang menerima akses kredit sebesar 2,96 persen. Secara agregat, dapat dilihat bahwa proporsi penerima akses kredit didominasi rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga tidak miskin memiliki proporsi mencapai 96 persen sebagai penerima akses kredit. Sementara itu, proporsi rumah tangga miskin yang tidak menerima akses kredit hanya mencapai 4 persen.

**Tabel 2.**

**Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Akses Kredit Usaha Rakyat KUR (KUR)**

Karakteristik Ekonomi	Status Kemiskinan	Desa		Kota		Total		Proporsi (%)
		Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%	
Akses kredit	Miskin	17	0,12	23	0,15	40	0,14	0,04
	Tidak Miskin	362	2,6	502	3,28	864	2,96	0,96
	Total	379	2,72	525	3,43	904	3,09	
Tidak Menerima	Miskin	2.107	15,14	1.131	7,39	3.238	11,09	0,11
	Tidak Miskin	11.427	82,13	13.640	89,17	25.067	85,82	0,89
	Total	13.534	97,28	14.771	96,57	28.305	96,91	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan: \* mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga.

### Karakteristik Demografi



Pembahasan karakteristik rumah tangga miskin dilihat dari aspek demografi meliputi jenis kelamin kepala rumah tangga dan jumlah anggota rumah tangga. Pada pembahasan pertama, akan ditampilkan distribusi rumah tangga dari sisi jenis kelamin kepala rumah tangga berikut

**Tabel 3.**  
**Distribusi Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga**

Karakteristik Sosial	Status Kemiskinan	Desa		Kota		Total		Proporsi (%)	
		Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%		
Jenis Kelamin Kepala RT	Perempuan	Miskin	241	1,58	415	2,98	656	2,25	0,13
		Tidak Miskin	2.411	15,76	1.944	13,97	4.355	14,91	0,87
		Total	2.652	17,34	2.359	16,96	5.011	17,16	100,00
	Laki-laki	Miskin	913	5,97	1.709	12,28	2.622	8,98	0,11
		Tidak Miskin	11.731	76,79	9.845	70,76	21.576	73,87	0,89
		Total	12.644	82,66	11.554	83,04	24.198	82,84	100,00

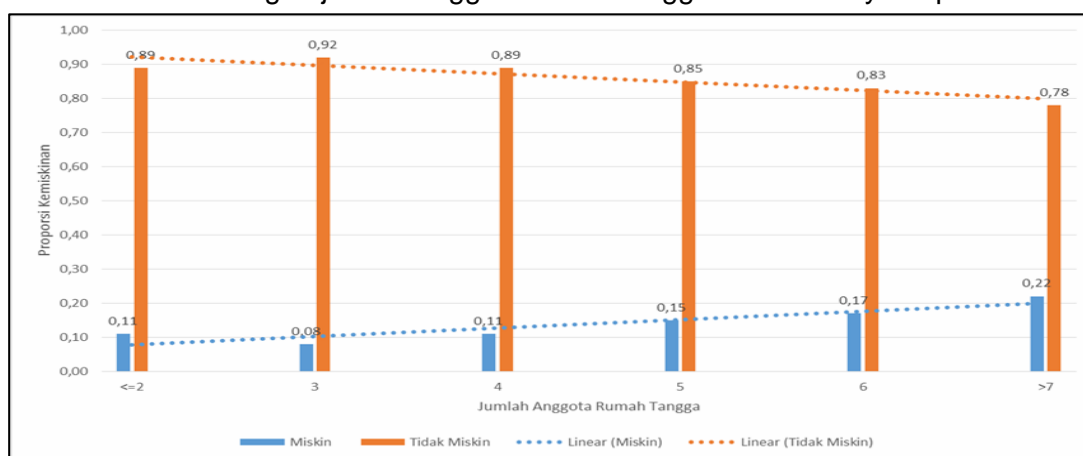
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan: \* mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga.

Berdasarkan Tabel tersebut, jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin wanita tergolong relatif sedikit yaitu hanya mencapai sekitar 17,16 persen dari total sampel Susenas yang dilakukan BPS. Jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh seorang pria mencapai 82,84 persen dari seluruh sampel. Mayoritas kepala rumah tangga wanita berada di perdesaan yaitu sebesar 17,34 persen dibandingkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga berjenis kelamin wanita yang bertempat tinggal diperkotaan yang mencapai 16,96 persen.

Jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga wanita yang jatuh miskin adalah sekitar 2,25 persen dari total sampel kepala rumah tangga wanita. Mayoritas rumah tangga tersebut berada di perkotaan yaitu sekitar 2,98 persen. Sementara itu, rumah tangga dengan kepala rumah tangga wanita mampu bertahan diatas garis kemiskinan. Jika dilihat secara agregat, perbandingan rumah tangga miskin yang dikepalai oleh seorang wanita dengan rumah tangga tidak miskin yang dikepalai wanita adalah mencapai 13 persen dibanding 87 persen.

Karakteristik demografi berikutnya adalah jumlah anggota rumah tangga. Rumah tangga miskin selalu identik dengan jumlah anggota rumah tangga yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan rumah tangga tersebut harus membagi pendapatan yang terbatas dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Berikut ini dapat dilihat gambaran data hubungan antara proporsi kemiskinan dengan jumlah anggota rumah tangga. Informasinya dapat dilihat berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

**Gambar 4. Karakteristik Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Jumlah Anggota Rumah Tangga**

Berdasarkan gambar tersebut, rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga yang

sedikit maka memiliki proporsi rumah tangga miskinnya juga rendah. Akan tetapi, ketika sebuah rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah tangga yang semakin besar, proporsi rumah tangga miskin juga meningkat. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga kurang dari atau sama dengan dua memiliki proporsi kemiskinan sebesar 11 persen dan proporsi ini terus meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran rumah tangga. Pada keluarga dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari atau sama dengan tujuh, proporsi kemiskinannya mencapai 22 persen. Secara umum, pola dari karakteristik ini menunjukkan bahwa ketika kelompok rumah tangga memiliki jumlah anggota rumah tangga semakin besar maka proporsi rumah tangga yang tergolong miskin juga menjadi semakin besar.

### Karakteristik Sosial

Variabel yang termasuk dalam karakteristik sosial dalam studi ini adalah kepemilikan kartu asuransi kesehatan miskin dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Kepemilikan kartu asuransi kesehatan miskin sebagai asuransi kesehatan gratis dari pemerintah untuk masyarakat miskin diharapkan mampu menjadikan rumah tangga keluar dari kemiskinan dengan mengurangi dampak dari resiko guncangan kesehatan seperti sakit. Sementara variabel pendidikan dimaknai memiliki hubungan yang linear dengan status kemiskinan seseorang. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin kecil pula kemungkinan (*probability*) seseorang atau rumah tangga untuk jatuh dalam keadaan atau kondisi miskin. Berikut ini akan dijelaskan secara detail distribusi kemiskinan berdasarkan karakteristik sosial yaitu kepemilikan kartu kesehatan untuk rumah tangga miskin.

**Tabel 4.**  
**Distribusi Karakteristik Rumah Tangga Miskin Berdasarkan Kepemilikan Kartu Asuransi Kesehatan Miskin**

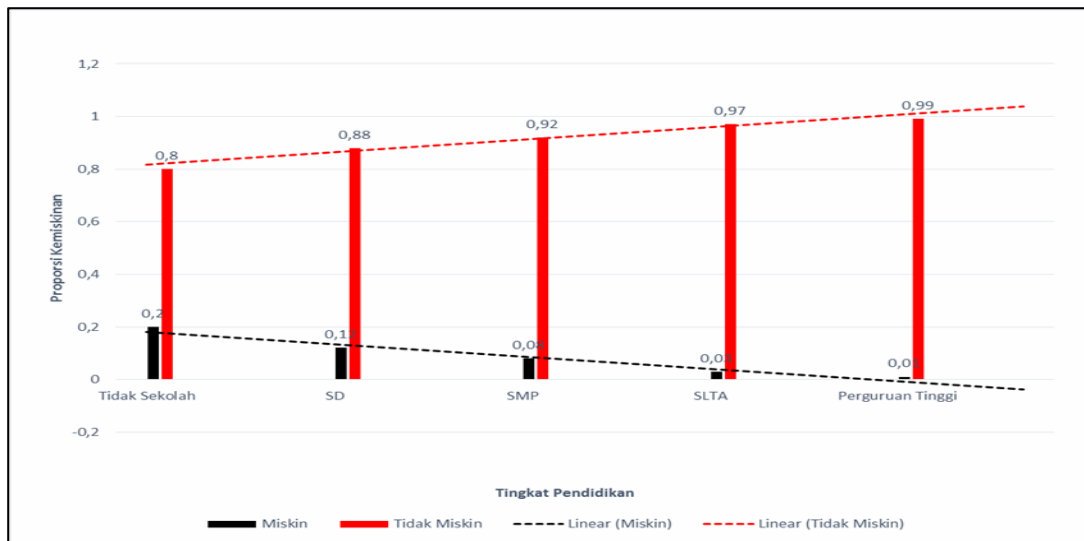
Karakteristik Ekonomi	Status Kemiskinan	Desa		Kota		Total		Proporsi (%)
		Freq*	%	Freq*	%	Freq*	%	
Memiliki Asuransi Kesehatan Miskin	Miskin	977	5,76	421	3,44	1.395	4,78	0,19
	Tidak Miskin	3.516	20,73	2.407	19,65	5.926	20,29	0,81
	Total	4.493	26,49	2.828	23,09	7.321	25,06	100,00
Tidak Memiliki Asuransi Kesehatan Miskin	Miskin	733	4,32	1.147	9,36	1.880	6,44	0,09
	Tidak Miskin	11.735	69,19	8.273	67,55	20.008	68,50	0,91
	Total	12.468	73,51	9.420	76,91	21.888	74,95	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Keterangan: \* mengindikasikan frekuensi dalam satuan rumah tangga.

Berdasarkan Tabel tersebut, terdapat sekitar 25,06 persen yang mempunyai kartu asuransi kesehatan rumah tangga miskin. Jumlah rumah tangga yang memiliki kartu asuransi kesehatan miskin tersebut terbagi menjadi 1.395 rumah tangga berstatus miskin dan 5.926 berstatus tidak miskin. Sementara itu, sekitar 6,44 persen rumah tangga miskin yang tidak memiliki kartu asuransi kesehatan miskin. Mayoritas rumah tangga yang menerima akses asuransi kesehatan berada di wilayah perdesaan yaitu sekitar 26,49 persen. Hal yang perlu diperhatikan dari data distribusi rumah tangga yang menerima asuransi kesehatan miskin adalah rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap asuransi kesehatan mayoritas berada di wilayah perkotaan yaitu hingga mencapai 9,36 persen. Sementara rumah tangga miskin yang tidak memiliki asuransi kesehatan miskin dan berada di wilayah perdesaan adalah sekitar 4,32 persen.

Karakteristik sosial rumah tangga miskin berikutnya adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Pada Gambar berikut ini akan dijelaskan karakteristik tersebut secara lebih detail.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

**Gambar 5. Karakteristik RumahTangga Miskin Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga**

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin rendah proporsi kemiskinannya. Proporsi kemiskinan dari kepala rumah tangga yang tidak bersekolah sebesar 20 persen dan kemudian semakin menurun menjadi 12 persen pada tingkat pendidikan sekolah dasar. Pada tingkat pendidikan SMP, proporsi kemiskinan adalah sebesar 8 persen dan pada tingkat SLTA proporsi kemiskinan menjadi 3 persen. Tingkat pendidikan perguruan tinggi memiliki proporsi kemiskinan terendah yakni sebesar 1 persen.

### Hasil Estimasi

Berikut ini ditampilkan hasil estimasi pada model determinan status kemiskinan rumah tangga dengan menggunakan metode regresi logistik (logit model).

**Tabel 5.**

**Hasil Estimasi Model Determinan Status Kemiskinan Rumah Tangga**

Variabel	Koefisien	Standard Error	Z	P> Z	Odds Ratio	Prob
						(Marginal)
<b>Pendidikan</b>	-0,1249	0,0048	-26,13	0,000***	0,8826	-0,0096
<b>Keluarga</b>	0,2502	0,0124	20,23	0,000***	1,2843	0,0193
<b>JenisKelamin</b>	-0,2515	0,0524	-4,8	0,000***	0,7776	-0,0208
<b>Pekerjaan</b>	0,6355	0,0408	15,56	0,000***	1,8881	0,054
<b>Kredit</b>	-0,8323	0,1662	-5,01	0,000***	0,435	-0,0468
<b>Asuransi</b>	0,6039	0,04	15,06	0,000***	1,8291	0,053
<b>Konstanta</b>	-2,5768	0,0622	-41,37	0,000***	0,076	-
<b>Jumlah Observasi</b>	<b>29.209</b>					
<b>Prob&gt;ChiSquare</b>	<b>0</b>					

Catatan: \*Signifikanditingkat10%, \*\*Signifikanditingkat5%, \*\*\*Signifikanditingkat1%.

Berdasarkan Tabel tersebut hasil regresi model determinan status kemiskinan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur memiliki enam variabel yang signifikan dalam uji Z dengan tingkat kesalahan 0 persen yaitu pendidikan kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, sektor pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan akses terhadap asuransi kesehatan miskin. Selain itu, hasil uji Chi-Square terhadap model ini menunjukkan bahwa model ini signifikan dengan tingkat kesalahan

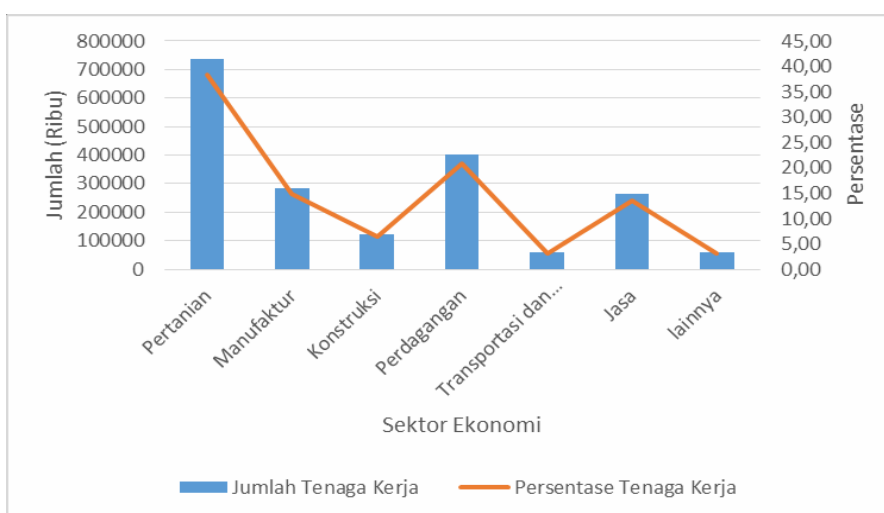
hampir mendekati 0 persen. Kinerja model determinan status kemiskinan rumah tangga ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi (Pseudo R-Squared) sebesar 0,1072. Hal ini berarti bahwa sebesar 10,72% variasi dari variabel dependen berupa status kemiskinan rumah tangga dapat dijelaskan oleh variabel independen di dalam model yakni pendidikan kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, dummy jenis kelamin kepala rumah tangga, dummy sektor pekerjaan kepala rumah tangga, dummy akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dummy akses terhadap asuransi kesehatan miskin. Sisanya, sebesar 89,28 persen variasi dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen di luar model determinan status kemiskinan rumah tangga.

Variabel pendidikan kepala rumah tangga memiliki kecenderungan berhubungan negatif dengan status kemiskinan rumah tangga. Hal ini berarti peningkatan lama tahun sekolah akan mengurangi kemungkinan rumah tangga untuk jatuh miskin. Artinya, semakin lama tahun sekolah seseorang atau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan menurunkan kondisi seseorang untuk mengalami kemiskinan. Secara umum, pendidikan akan membantu rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Menurut teori human capital yang disampaikan oleh Reid (2019), pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kesejahteraan individu baik secara material maupun non material. Ini terjadi karena pendidikan dan pelatihan mampu meningkatkan produktivitas seseorang. Pendidikan yang lebih tinggi akan memberikan peluang bagi rumah tangga miskin untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan guna memperoleh pendapatan atau kesejahteraan yang lebih baik. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran utamadalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan juga membuat seseorang mendapatkan peluang kerja yang lebih luas di sektor modern (Todaro dan Smith, 2006). Oleh karena itu, perbaikan pendidikan dapat menghasilkan kemungkinan individu untuk jatuh miskin menjadi berkurang. Menurut van Zon *et al.*, (2019), pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan berbanding terbalik. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, maka jumlah orang miskin akan menjadi lebih rendah, karena pendidikan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung dalam pencapaian upah yang lebih tinggi. Asumsi dasar teori modal manusia juga menyatakan hal yang serupa, bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, di satu pihak, meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan. Implikasi kebijakan yang dapat ditempuh terkait dengan temuan studi ini adalah meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Peningkatan akses pendidikan ini dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan pendirian bangunan sekolah dengan segala infrastrukturnya, penyebaran jumlah guru profesional, pembebasan biaya pendidikan hingga pada pemberian insentif khusus bagi keluarga miskin yang menyekolahkan anaknya. Hal ini perlu dilakukan, mengingat laporan Bank Dunia (2012) masih menunjukkan bahwa hingga tahun 2011, rumah tangga dengan pengeluaran perkapita dikuantil terbawah memiliki akses pendidikan yang juga paling rendah.

Hasil selanjutnya terkait dengan ukuran rumah tangga. Variabel ini berkecenderungan memiliki hubungan positif dengan status kemiskinan rumah tangga. Artinya, peningkatan jumlah anggota rumah tangga akan meningkatkan kemungkinan rumah tangga untuk jatuh miskin. Hal tersebut dapat terjadi karena semakin besar jumlah anggota rumah tangga maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung sebuah keluarga. Jika beban penambahan jumlah anggota rumah tangga yang besar ini terjadi pada keluarga miskin, tentunya akan membuat rumah tangga ini terperangkap mengalami kemiskinan dalam durasi waktu yang lama. Rumah tangga miskin dengan pendapatan yang rendah harus membagi pendapatannya ini dengan jumlah anggota keluarga yang semakin banyak. Biaya pemenuhan gizi meningkat, biaya pendidikan meningkat yang pada akhirnya semakin membuat keluarga ini mengalami kemiskinan lebih lama lagi. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dacuycuy dan Lim (2013) di Filipina, bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Ukuran rumah tangga yang besar juga berkaitan erat dengan seberapa banyak anggota rumah tangga yang produktif dan yang tidak produktif (beban keluarga). Anggota rumah tangga yang tidak produktif inilah yang tidak memiliki kontribusi

terhadap pendapatan rumah tangga sehingga memperparah kondisi kemiskinan sebuah rumah tangga. Pada akhirnya rumah tangga akan mengalami kemiskinan dalam durasi waktu yang lebih lama. Selain itu, Sugianto *et al.* (2019) juga menyatakan bahwa dengan tingkat pendapatan yang tetap, penambahan anggota rumah tangga memaksa sebuah rumah tangga untuk mengurangi konsumsinya agar dapat menghidupi anggota rumah tangga yang baru tersebut. Implikasi kebijakan yang harus dilakukan adalah pengaturan jumlah penduduk. Pengaturan ini dapat dilakukan dengan sosialisasi dan pelaksanaan program keluarga berencana. Mengacu pada laporan Kinerja Pembangunan Pemerintahan KIB jilid I dan II (2014), sosialisasi program Keluarga Berencana (KB) dapat dikatakan telah berhasil dengan tingginya indikator kesadaran masyarakat atas KB. Akan tetapi, keberhasilan ini masih belum diikuti dengan jumlah rumah tangga yang mengikuti program KB.

Selanjutnya untuk variabel *dummy* sektor pekerjaan kepala rumah tangga. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian ternyata juga berkecenderungan berhubungan positif dengan status kemiskinan rumah tangga. Artinya, kepala rumah tangga yang bekerja disektor pertanian memiliki probability jatuh miskin lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga yang bekerja disektor selain pertanian. Kondisi ini dapat terjadi karena sektor pertanian merupakan sektor ekonomi dengan produktifitas yang rendah. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja yang bekerja disektor ini, akan tetapi memiliki pendidikan yang rendah. Munculnya rumah tangga tani yang mengalami kemiskinan juga diakibatkan banyak pekerja sektor pertanian yang menjadi buruh tani dengan pendapatan yang rendah. Berikut ini akan digambarkan kondisi ketenagakerjaan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur:



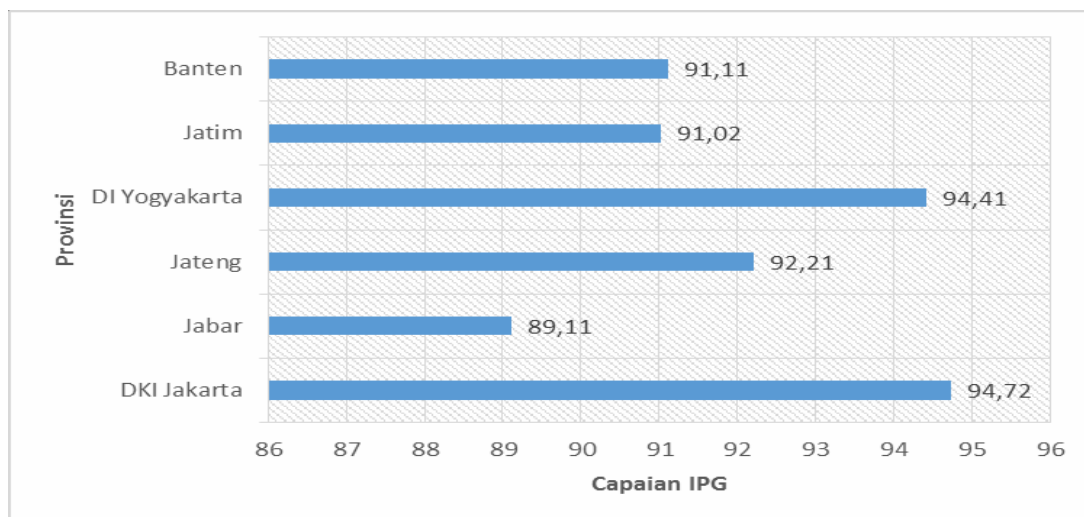
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

**Gambar 6. Serapan Tenaga Kerja Sektoral Provinsi Jawa Timur Tahun 2014**

Selain itu, sistem pengelolaan pertanian juga masih sangat tradisional dengan luas lahan garapan yang terbatas. Akibatnya, rumah tangga tani juga mendapatkan output pertanian yang sedikit, yang hanya cukup untuk konsumsi rumah tangga itu sendiri. Berikut ini dicantumkan besaran rata-rata upah yang diterima pekerja disektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya. Hasil penelitian ini selaras dengan studi yang dilakukan oleh Dartanto dan Nurkholis (2013) di Indonesia. Temuannya bahwa rumah tangga pertanian sangat berkaitan dengan kemiskinan. Luas lahan yang sempit membatasi kapasitas produksinya, pengetahuan yang rendah menjadikan mereka tetap menggunakan sistem pertanian tradisional dengan mengandalkan alam. Oleh karena itu, hasil pertanian yang terbatas menjadikan rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga subsisten, yang memungkinkan sebuah rumah tangga untuk terus berada dalam kondisi miskin. Implikasi kebijakannya dapat berkaitan dengan pengembangan modernisasi pertanian. Secara teknis, hal ini dapat dilakukan dengan menghubungkan sektor industri manufaktur dengan pertanian agar menciptakan industri berbasis pertanian. Sektor pertanian sendiri harus mulai diperbaiki dengan perbaikan sistem pertanian, pembuatan irigasi hingga pada pengenalan teknologi.

Sementara itu terkait variabel *dummy* akses kredit, hasil estimasi menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerima akses kredit berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki kecenderungan berhubungan negatif dengan status kemiskinan rumah tangga. Artinya, rumah tangga yang menerima akses kredit memiliki kemungkinan jatuh miskin lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima akses kredit. Secara teori, pemberian akses kredit diharapkan mampu mereduksi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya guncangan baik internal maupun eksternal. Temuan ini sesuai dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan serapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi ke dua di level nasional pada tahun 2016.

Selanjutnya untuk variabel jenis kelamin kepala rumah tangga. Studi ini menemukan bahwa jenis kelamin kepala rumah tangga berpengaruh terhadap kemiskinan dengan koefisien bertanda negatif. Artinya, kepala rumah tangga yang berjenis kelamin wanita memiliki kemungkinan (*probability*) lebih rendah untuk jatuh miskin dibandingkan pria. Sebenarnya, secara teori rumah tangga dengan kepala keluarga seorang wanita akan membuat sebuah rumah tangga cenderung mengalami kemiskinan. Studi yang dilakukan oleh Hulme *et al.* (2001) mengkonfirmasi hal ini. Menurutnya, kepala rumah tangga wanita yang cenderung mengalami kemiskinan adalah wanita tua yang sudah tidak produktif bekerja atau seorang janda dengan kondisi miskin dan termarginalkan. Walau demikian, seiring perkembangan waktu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang terus berlangsung. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan gender ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016

**Gambar 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi di Pulau Jawa (IPG)**

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan gender di Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 2015, IPG Provinsi Jawa Timur adalah 91,02. Capaian ini menempatkan Provinsi Jawa Timur diposisi ke 5 dari 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang memiliki IPG sebesar 89,11. Telah terjadi perubahan paradigma tentang wanita dimasyarakat. Pada awalnya, wanita hanya dipandang sebagai bagian dari kehidupan domestik saja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, wanita sudah mulai mendapatkan kesempatan untuk turut serta dalam urusan publik. Akses pendidikan yang terbuka pada laki-laki maupun perempuan, akses kesehatan yang juga terbuka disertai dengan pasar tenaga kerja yang tidak lagi mendiskriminasi jenis kelamin seseorang.

Terakhir determinan kemiskinan juga dapat ditinjau bagaimana variabel akses terhadap asuransi kesehatan masyarakat miskin. Studi ini menemukan bahwa terdapat kecenderungan pengaruh antara kepemilikan asuransi kesehatan masyarakat miskin terhadap probabilitas status kemiskinan rumah tangga dengan tanda koefisien positif. Artinya, rumah tangga yang memiliki kartu asuransi kesehatan miskin memiliki probabilitas jatuh miskin lebih

tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki asuransi kesehatan miskin. Secara teori, variabel ini seharusnya memiliki keterkaitan negatif terhadap kemiskinan karena kebijakan ini muncul untuk menangani kemiskinan yang diakibatkan adanya guncangan seperti sakitnya kepala rumah tangga. Kondisi yang menarik ini dapat terjadi karena penyebaran kartu asuransi kesehatan miskin tidak merata kepada masyarakat miskin (Dartanto dan Nurkholis, 2013). Selain itu, Bank Dunia (2012) menyatakan bahwa kebijakan asuransi kesehatan masyarakat miskin hanya membantu masyarakat miskin yang ada di perkotaan untuk keluar dari kemiskinannya. Sebaliknya, asuransi ini tidak memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di desa karena berbagai keterbatasan fasilitas kesehatan. Salah satu keterbatasan tersebut adalah jarak tempuh untuk mencapai lokasi fasilitas kesehatan terdekat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari studi penelitian determinan kemiskinan di Jawa Timur yang ditinjau dari variabel penentu berdasarkan karakteristik ekonomi, demografi, dan sosial adalah bahwa pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, sektor pekerjaan kepala rumah tangga, akses terhadap KUR, dan akses terhadap asuransi kesehatan miskin bertendensi/berkecenderungan mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga. Variabel pendidikan, jenis kelamin kepala rumah tangga seorang wanita, dan akses terhadap KUR dari kajian yang dilakukan secara empiris menunjukkan memiliki kecenderungan untuk menurunkan probabilitas rumah tangga untuk menuju ke dalam kemiskinan. Sementara itu variabel ukuran rumah tangga yang semakin besar, jenis pekerjaan di sektor pertanian, dan kepemilikan asuransi kesehatan miskin kecenderungan untuk meningkatkan kemungkinan rumah tangga menuju ke dalam status kemiskinan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan, rekomendasi atau saran yang ditawarkan diantaranya: (1) mempertimbangkan timpangnya tingkat kemiskinan antar masing-masing daerah Kabupaten/Kota, kebijakan pengentasan kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing kabupaten/kota; (2) peningkatan investasi sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan kesehatan harus terus diupayakan khususnya di wilayah atau daerah dengan tingkat kemiskinan yang *relative* masih cukup tinggi, dan (3) kebijakan pemberian kredit usaha kepada masyarakat juga harus dipertimbangkan mengingat temuan penelitian ini yang membuktikan bahwa pemberian akses kredit mampu mengurangi probabilitas rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., & Bolton, P. (1997). A theory of trickle-down growth and development. *The Review of Economic Studies*, 64(2), 151-172.
- Ai, M. M., & Kameyama, Y. (2019). The relationship between international migration, remittances, education and poverty in South Asia. *Journal of Economics*, 7(3), 26-36.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2016*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- (2016). *Publikasi Jumlah dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, (online), (<http://bps.go.id>, diakses tanggal 01 Mei 2017).
- (2016). *Publikasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan 38 Provinsi di Indonesia*, (online), (<http://bps.go.id>, diakses tanggal 01 Mei 2017).
- Bank Dunia. (2012). *Poverty Measurement*, (Online), (<http://web.worldbank.org/>, diakses 01 Mei 2017).
- Baum, C. F. (2006). *An Introduction to Modern Econometrics Using Stata*. USA: Stata Press
- Bent, B. B. (2019). *The Impact of Microfinance on Poverty Reduction and Women*

- Empowerment. In *Rais Collective Volume—Economic Science* (pp. 72-86). Scientia Moralitas Research Institute.
- Bhuyan, B., Sahoo, B. K., & Suar, D. (2020). Nutritional status, poverty, and relative deprivation among socio-economic and gender groups in India: Is the growth inclusive?. *World Development Perspectives*, 100180.
- Biyase, M., & Talent, Z. (2017). *An Empirical Analysis of the Determinants of Poverty and Household Welfare in South Africa*. MPRA Paper Number 77085
- Dacuycuy, C. B., & Lim, J. A. (2013). Family Size, Household Shocks and Chronic and Transient Poverty in the Philippines. *Journal of Asian Economics*, (29): 101-112
- Dartanto, T.,h & Nurkholis. (2013). Finding Out The Determinant of Poverty Dynamics In Indonesia: Evidence From Panel Data. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*.
- Duarte, R. (2014). *Socioeconomic Determinants of Poverty in Paraguay*. Thesis. USA: Washington University.
- Edig, X. V., & Schwarze, S. (2011). Short-terms Poverty Dynamics of Rural Household: Evidence From Central Sulawesi, Indonesia. *Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics*, (112): 141-155
- Gobel, N. O. R., & Saleh, S. E. (2020). The Impact of Per Capita Income and Labour Absorption toward Poverty Level in Gorontalo Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 2(1).
- Gujarati, D. N., & Poter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar Terjemahan: Sumarno Zain*. Jakarta: Erlangga
- Herrera, J. (1999). *Ajuste Económico, Desigualdad, y Movilidad*. Working Paper DT/99/07, Développement et Insertion Internationale (DIAL) Paris
- Jacobus, R. (2014). *Profil Indonesia*. Alfabeta Yatim: Bandung
- Jallan, J. & Ravallion, M. (1998). Transient Poverty in Post-Reform Rural China. *Journal of Comparative Economics*, (26): 338–357.
- Johnston, E. M., McMorro, S., Thomas, T. W., & Kenney, G. M. (2019). ACA Medicaid expansion and insurance coverage among new mothers living in poverty. *Pediatrics*, 145(5).
- Kimsun, T. (2012). *Analysing Chronic Poverty in Rural Cambodia: Evidence from Panel Data*. Working Paper Series (66). A CDRI Publication
- Lee, C., & Kim, E. (2020). Measuring neighbouring effects on poverty in regional economies. *Applied Economics Letters*, 27(2), 104-112.
- Lijie, Z., Jiabin, N., & Dongpin, H. (2019). Analysis and countermeasures on paradox of “poverty caused by education” under the background of rural revitalization. *The Frontiers of Society, Science and Technology*, 1(5).
- Majeed & Muhammad. (2014). *Determinants of Households Poverty: Empirical Evidence from Pakistan*. MPRA Paper Number 57744
- Michálek, A., & Východník, J. (2019). Economic growth, inequality and poverty in the EU. *Social Indicators Research*, 141(2), 611-630.
- Miranti, Riyana. (2010). Poverty in Indonesia 1984-2002: The Impact of Growth and Change in Inequality. *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, (46): 79-97
- Morduch & Haley. (2002). *Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction*. NYU Wagner Working Paper Series Number1014.
- Oludiran, A. S. (2004). *Determinants of Poverty among Selected Fisherman in Nigeria*. Working Paper Series Department of Agricultural Economics University of Ibadan
- Patel, L. (2019). Gender: Toward gender equality and poverty reduction. In *Handbook of Social Policy and Development*. Edward Elgar Publishing.
- Paul, P. (2019). Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis. *Children and Youth Services Review*, 100, 16-21.
- Pueyo, A., & Maestre, M. (2019). Linking energy access, gender and poverty: A review of the literature on productive uses of energy. *Energy Research & Social Science*, 53, 170-181.



- Reid, T. (2019). A chain is only as strong as its. *Teacher's Race Course, A: Ruminations And Reflections*, 101.
- Runsinarith, P. (2011). *Determinants of Rural Poverty in Cambodia*. Graduate School of International Development. Nagoya University
- Sugianto, E., Mukhtar, M., & Zani, M. (2019). Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Petani Tidak Miskin dan Miskin (Studi Kasus di Desa Raimuna Kecamatan Maligano Kabupaten Muna). *Jurnal Ilmiah Membangun Desa dan Pertanian*, 4(1), 281386.
- Suwardi, A. (2011). *Modul Stata: LPM, Logit, dan Probit Model*. Jakarta: Laboratorium Komputasi Departemen Ilmu Ekonomi FE Universitas Indonesia
- Swastika, D., & Supriyatna, Y. (2008). The Characteristics of Poverty and Its Alleviation in Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26 (2): 103-115
- Teka, A. M., Woldu, G. T., & Fre, Z. (2019). Status and determinants of poverty and income inequality in pastoral and agro-pastoral communities: Household-based evidence from Afar Regional State, Ethiopia. *World Development Perspectives*, 15, 100123.
- Todaro, M. E., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Terjemahan oleh Haris Munandar. 2006. Jakarta: Erlangga
- Vaughan, D. (1997). The Trickle-Down Effect: Policy Decisions, Risky Work. *California management review*, 39(2), 80-102.
- van Zon, S. K., Reijneveld, S. A., de Leon, C. F. M., & Bültmann, U. (2019). Correction to: The impact of low education and poor health on unemployment varies by work life stage. *International journal of public health*, 64(5), 809-812.
- Wardhana, D. (2010). *Multidimensional Poverty Dynamics in Indonesia (1993-2007)*. Disertasi. Inggris School of Economics The University of Nottingham.